



POLEMIK PILKADA 2020 DI MEDIA SOSIAL TWITTER ELECTION POLEMIC IN 2020 ON TWITTER SOCIAL MEDIA

¹Terang Bintang Samuel Silalahi, ²Ahmad Toni

¹²Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta Jl. Ciledug Raya,
Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia.
Email: 11971600349@student.budiluhur.ac.id; ahmad.toni@budiluhur.ac.id

Diterima tgl. Agustus Direvisi tgl. November Disetujui tgl. Desember 2022

ABSTRACT

Regional head elections in Indonesia will be held at the end of 2020, to be precise, on December 9, 2020. Quoted from data taken from droneemprit.id, the 'PILKADA' TREND recorded around (175k) conversations on Twitter social media. The main purpose of this study is to examine the political communication that occurs on Twitter social media related to the pros and cons of the implementation of the 2020 Pilkada. Political communication that is built through Twitter social media, can shape public opinion and simultaneously mobilize massive political support, please note that Twitter has a very strong role to influence, and even shape the results of a campaign (Caplan, 2013, 12). The method used in this research is descriptive qualitative method. The data collection method in this study is library research. The results of this study show that the pros and cons of holding local elections are common, because through social media, twitter, political communication can occur massively.

Keywords: *Regional head elections, Twitter, Political Communication*

ABSTRAK

Pilkada di Indonesia akan diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Dikutip dari data yang diambil dari droneemprit.id, TREN 'PILKADA' tercatat sekitar (175k) percakapan di media sosial Twitter. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk meneliti komunikasi politik yang terjadi di media sosial twitter terkait dengan pro dan kontra terhadap pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini. Komunikasi politik yang dibangun melalui media sosial twitter, dapat membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif, perlu diketahui bahwa twitter memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi, dan bahkan membentuk hasil dari suatu kampanye (Caplan, 2013, 12). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini bahwa Pro dan Kontra pada penyelenggaraan Pilkada adalah hal yang biasa, karena melalui media sosial twitter komunikasi politik dapat terjadi secara masif.

Kata Kunci: Pilkada, Twitter, Komunikasi Politik

1. PENDAHULUAN

Pilkada serentak di Indonesia akan diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Awalnya pelaksanaan Pilkada tersebut akan diadakan pada tanggal 23 September 2020 Berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, namun mengingat pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan, maka DPR dan Pemerintah beserta seluruh penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk memundurkan jadwal pelaksanaan Pilkada melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020, menjadi tanggal 9 Desember 2020.



Keputusan ini dinilai sangat kontroversial dan terus menjadi perdebatan dikalangan akademisi, karena dimasa pandemi covid-19 Pemerintah secara konsisten menghimbau masyarakat melalui berbagai media untuk tidak melakukan kegiatan secara berkerumun atau berkumpul tetapi tetap memustikan agar Pilkada 2020 bisa terlaksanakan meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Penetapan Pilkada di bulan Desember 2020 dianggap tidak realistis, karena faktanya hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional (Ramadhan, 2020). Banyak yang khawatir, jika Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020 maka akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Permasalahan utama pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini terlebih karena diselenggarakan pada kondisi pandemi Covid-19, dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada in sendiri syarat akan aktivitas berkerumun dan berkumpul, mulai dari tahap penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahap kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak (Hergianasari, 2016).

Banyak kalangan pesimis dengan kondisi dan situasi yang dihadapi saat ini, banyak juga yang berpendapat bahwa kondisi dari kesehatan masyarakat dan permasalahan ekonomi yang dihadapi jauh lebih penting dibandingkan Pilkada yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini yang sarat akan kepentingan dari berbagai pihak. Namun disisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 yang akan diadakan pada bulan Desember juga merupakan amanat penting dari Undang-undang yang harus dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada di era pandemi Covid-19 ini, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa masyarakat juga memiliki peranan kunci untuk mendorong pihak pemerintah dalam rangka sinergi terhadap kesuksesan pelaksanaan Pilkada di tiap-tiap daerah melalui tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga dapat menentukan tentang sejauh mana suatu daerah akan mampu membendung laju penanganan Covid-19, atau justru malah membengkak dan semakin menambah daftar cacatan korban.

Sesuai dengan data International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) pada artikel yang berjudul “Global Overview of Covid-19: Impact on elections, disebutkan bahwa akibat dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan oleh Pemerintahnya, sedikitnya terdapat 50 wilayah dan negara yang sedang menghadapi potensi penyebaran dari pandemi covid-19, sehingga beberapa negara memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Beberapa negara juga ada yang tetap melaksanakan Pemilu maupun Pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sesuai data (Global Overview of COVID-19: Impact on Elections | International IDEA, n.d.). Korea Selatan layak untuk dijadikan gambar keberhasilan dari pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Korea Selatan melakukan sosialisasi yang masif serta memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan pemilu, dan sebagaimana kita ketahui, pemilu adalah konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat, 2010).

Banyak narasi dan opini yang bernada pro maupun kontra atas tetap dilaksanakannya Pilkada pada tahun 2020 pada new media terlebih media sosial twitter. Para Buzzer juga mulai terlibat dalam narasi dan hastags kampanyenya untuk membela serta menyerang pasangan calon maupun kebijakan-kebijakan dan keputusan pemerintah agar tetap melanjutkan Pilkada dimasa pandemi covid-19. Tujuan dari para buzzer ini adalah untuk mempengaruhi pembaca atas narasi dan hastags yang dikampanyekan. Polemik ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat pelaksanaannya sendiri

dimasa pandemi covid-19 disaat jumlah kasus penyebarannya terus bertambah diseluruh dunia. Media sosial twitter juga dipilih sebagai sarana mempromosikan diri juga mampu memberikan tempat bagi politisi untuk menginformasikan berbagai hal dengan real time tentang kegiatan politiknya (Aharony, 2010, 589), serta mampu menghilangkan jarak antara politisi dengan masyarakat atau pembacanya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Coutss & Gruman (2005: 254) yakni komunikasi yang dimediasi oleh komputer, akan menghasilkan kesetaraan partisipasi yang lebih tinggi dari pada komunikasi tatap muka. Pandangan tersebut didukung dengan fakta terkait kepiawaian mantan Presiden Amerika Serika Barack Obama dalam mengelola dan menggunakan teknologi new media seperti media sosial disetiap kegiatan politiknya, sehingga mampu mengalahkan lawan politiknya Jhon McCain (Aaker dan Chang, 2010; Manlow dan Friedman, 2009).

Melihat uniknya kasus ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Pro dan Kontra Pilkada 2020 menjadi trending di twitter, dan bagaimana Pemerintah dan penyelenggara dalam hal ini KPU meyakinkan masyarakat untuk tetap mengikuti pesta demokrasi ini dengan mentaati protokol kesehatan ketat. Penulis mencoba mencari gambaran berdasar data-data yang ada di media massa, mencari literatur dan jurnal terkait pelaksanaan Pilkada di era pandemi Covid-19 dan juga mencari literatur terkait pengaruh media sosial terutama twitter terhadap Pilkada.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu Mukhtar (2013). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Sugiyono (2017). Metode pengumpulan data pada kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan Nazir (2013).

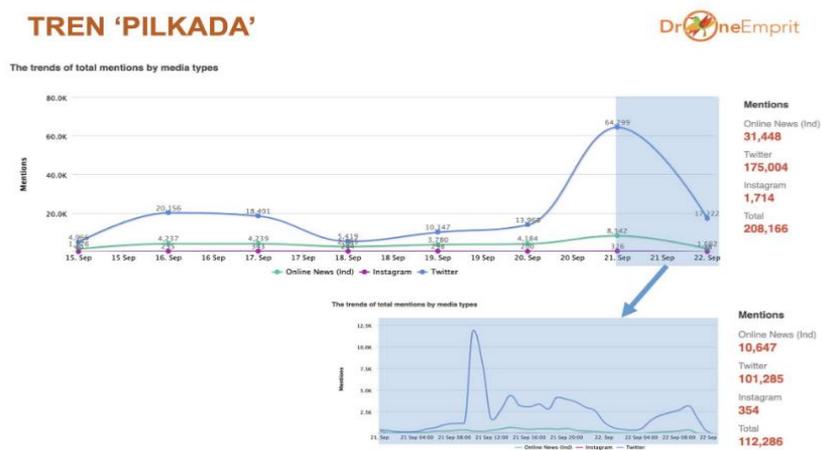
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Awal Kemunculan Pro dan Kontra

Seminggu terakhir (15-22 September 2020) percakapan tentang "Pilkada" cukup tinggi. Tercatat sekitar 208k percakapan, di media sosial Twitter terdapat (175k) percakapan, melalui berita online terdapat (31k) percakapan, dan di media sosial IG terdapat (1,7k) percakapan yang terjadi. Tercatat juga sejak 21 September terdapat (112k) percakapan, di media sosial Twitter (101k) percakapan, melalui berita online tercatat (10k) percakapan, dan melalui media sosial IG terdapat (354) percakapan, saat, Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020. Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat dan Ketua Komisi II DPR, pada Senin, 21 September 2020. Keputusan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada Serentak ditengah-tengah pandemi Covid-19 berimplikasi kepada banyaknya pro-kontra dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mengusulkan untuk pilkada serentak tahun 2020 tersebut ditunda, mengingat grafik peningkatan penyebaran wabah pandemi COVID-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya.



Gambar 1. Tren Mentions Pilkada di Media



Sumber: DroneEmprit, 2020

3.2. Narasi dan Opini Kontra Pilkada 2020

Melalui media sosial twitter pribadinya narasi atau pernyataan yang bernada kontra disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE, beliau merupakan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sir I Guru Besar UIN Jakarta, beliau juga dikenal sebagai cendekiawan muslim, untuk tweetnya tersebut mendapatkan 3,3K retweets dan 7K likes. Statement Prof @Prof_Azyumardi yang cukup menghentak, yang menyatakan akan GOLPUT dalam Pilkada 9 Des 2020, sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang wafat, paling disukai dan banyak dishare. Pemahaman yang seperti ini tentunya dapat meningkatkan pergejolan pada masyarakat agar melakukan hal yang serupa.

Gambar 2. Tweet Kontra Prof. Azyumardi Azra





Sumber: Twitter, 2020

Hal yang bernada kontra juga datang dari dr. Gunadi, Ph.D,Sp.BA, beliau mengatakan melalui media sosial pribadi twitternya “Win2 solution aja gmn pak @jokowi, semua pilkada ditunda kecuali solo dan medan ? Setuju ya pak ? Yg penting gibran dan bobby jadi walikota, daerah lain sptnya ga penting2 amat buat bapak, ok ya..”, untuk tweetnya tersebut mendapatkan 2,5K retweets dan 4,4K likes.

Gambar 3. 5 Besar Retweet Kontra Pilkada 2020

MOST RETWEETED 'PILKADA' /1			DroneEmprit		
Avatar	User	Status	#Followers	#Retweeted	All Time
	Azyumardi Azra @Prof_Azyumardi	Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19. Pilkada di masa pandemi yg terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih.... https://t.co/VH0YVv6yq4 21/Sep/2020 18:37 WIB Lat Graph	28,247	2,215	3,228 6,790
	Dr.Gunawan @GundiDr	Win2 solution aja gmn pak @jokowi, semua pilkada ditunda kecuali solo dan medan? Setuju ya pak? Yg penting gibran dan bobby jadi walikota, daerah lain sptnya ga penting2 amat buat bapak, ok ya.. 21/Sep/2020 14:48 WIB Lat Graph	39,734	1,899	2,424 4,342
	Farid Gaban @faridgaban	NU dan Muhammadiyah itu ada-ada saja... minta pilkada ditunda. Terus gimana dong anak dan menantu gue yg udah ngebet jadi walikota? Kalian nggak punya perasaan. Usul itu mbok, ya, yang solutp... 21/Sep/2020 13:37 WIB Lat Graph	13,599	942	1,501 5,139
	Pegawhy @msofyan	Bayangin kalo ada zombie outbreak terus negara tetep mau adain pilkada 21/Sep/2020 18:50 WIB Lat Graph	14,758	531	1,247 2,573
	Gia Pratama @GiaPratamaMD	Siapa yang masih peduli Pilkada? serius deh. yang boro-boro semangat mengikuti rangkaian kampanye, debat, sampe pencoblosan, dan yang udah ga peduli pilkada tahun ini ada atau engga. coba RT. 21/Sep/2020 19:57 WIB Lat Graph	265,880	726	1,182 419

Sumber: DroneEmprit, 2020

Narasi-narasi diatas mendorong agar pilkada 2020 untuk ditunda dahulu. Dikutip dari Serambi News (2020), pernyataan sikap menolak juga disampaikan oleh salah satu pimpinan lembaga DPD RI Dr. Agustin Teras Narang, S.H. Pada sesi wawancara dengan para wartawan, beliau mengatakan

disaat yang bersamaan seluruh dunia bahkan Indonesia sedang berjuang untuk mengatasi pandemi covid-19 ini. Pemerintah daerah juga turut serta aktif dalam penanganan untuk menekan tingkat penyebaran covid-19 di daerah masing-masing. Selain itu, WHO sebagai badan kesehatan dari dunia juga menyampaikan bahwa pandemi covid-19 masih terus aktif dan menyebar hingga saat ini. Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2020 ini melibatkan kurang lebih 105 juta penduduk yang ada di Indonesia, tersebar di 270 daerah yang tentunya rawan dan rentan akan penyebaran covid-19 (Eda, 2020).

3.3. Narasi dan Opini Pro Pilkada 2020

Himbauan yang bernada Pro disampaikan Polres Trenggalek melalui akun media sosial twitternya dengan hastag #MaklumatKapoliTaataProkres, akun media sosial twitter Polres Trenggalek menghimbau agar masyarakat taat atau mematuhi protokol kesehatan pada saat Pilkada. Polri yang dalam hal ini bertugas mengamankan jalannya pilkada ikut memberikan atensi terhadap potensi kerumunan, karena potensi timbulnya kerumunan massa dapat menyebabkan terjadinya penambahan penyebaran Covid-19.

Gambar 4. Himbauan Polres Trenggalek Untuk Taat Prokes Saat Pilkada



Sumber: Twitter, 2020

Gambar 5. Top Hastags Untuk Taat Prokes Saat Pilkada



Sumber: DroneEmprit, 2020

Berikut juga populer hastags untuk taat protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020 yang disampaikan oleh jaringan Humas Polri dari berbagai daerah, dan juga dari para pendukung pasangan calon yang mengajak masyarakat untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar dan semestinya tanpa menimbulkan cluster penyebaran kasus covid-19 yang baru.

3.4. Alasan Pemerintah Untuk Melanjutkan Pilkada 2020

Gambar 6. Perbandingan Kasus Covid-19 dan Alasan Pemerintah Lanjut Pilkada 2020





Sumber: Katadata, 2020

Berdasarkan data terakhir per 2 Oktober 2020, Indonesia berada di posisi ke-23 secara global berkenaan dengan jumlah kasus positif Covid-19. Terkait pandemi ini, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap mempertahankan rasa optimis bahwa Indonesia dapat segera melalui tantangan virus corona. “Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimistis dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus optimistis,” ucap pada Jokowi dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (4/10/2020).

Ada beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk terinfeksi virus covid-19 lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Seperti, US yang berada di urutan pertama (7.495.136 kasus), India (6.397.896 kasus), Brasil (4.849.229 kasus), dan Rusia (1.194.643 kasus). Juru Bicara Presiden Jokowi juga menyatakan, bahwa Pilkada 2020 akan tetap diselenggarakan. Juru Bicara Presiden juga mengatakan, bahwa negara lain di dunia tetap menjalankan pemilu di tengah pandemi covid-19 seperti Amerika Serikat (AS), yang akan menggelar pemilihan presiden pada November 2020 mendatang. Menurut Juru Bicara Presiden, Indonesia patut menjadikan hal ini sebagai contoh terkait pelaksanaan Pemilu dimasa pandemi, namun tetap harus dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan yang ketat.

4. PENUTUP

Proses Pilkada kali ini seperti memberikan keleluasaan kepada para panitia penyelenggara Pilkada, kandidat maupun Pemerintah dalam hal menyebarkan konten-konten secara verbal maupun nonverbal agar menciptakan personal branding dan atau konten untuk menghimbau masyarakat agar taat protokol kesehatan pada saat pra dan pasca Pilkada. Masing-masing gencar melakukan komunikasi politik ke publik melalui media sosial guna mencari suara massa. Komunikasi politik yang terjadi di media sosial twitter sangat dimanfaatkan oleh para buzzer dengan menyertakan hastags atau tagar untuk meningkatkan frekuensi pembicaraan tentang pilkada sehingga mencapai trending topic. Kemunculan buzzer ini sendiri juga merupakan suatu fenomena yang menarik, sebab Jeff Staple yang merupakan pakar dari media sosial mengatakan bahwa buzzer boleh diartikan sebagai orang atau akun yang opininya dapat membuat pengikutnya atau orang lain bereaksi setelah melihatnya.

Tercatat jumlah pemilih pemula pada 18 Juli 2020 bertambah sebanyak 456.256 orang, yang pada tanggal 09 Desember 2020 nanti sudah berusia 17 tahun dan jumlah kaum milenial berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 sebanyak 83.992.000 orang. Para pemilih pemula dan kaum milenial ini nantinya diharapkan dapat terlibat agar mau menggunakan hak suaranya atau terpengaruh untuk tidak memilih, mengingat dalam realitasnya twitter sebagai bentuk komunikasi politik dapat menciptakan motivasi, aktivasi dan diferensiasi kepada para pengikut atau pembacanya, karena informasi yang disampaikan langsung kepada pribadi dan lebih intim dari pada melalui televisi dan radio, sehingga memberikan potensi ruang gerak kepada kaum milenial tersebut untuk menentukan responsnya.

Hafied Cangara (2009) menyimpulkan bahwa komunikasi politik dapat dimaknai sebagai proses komunikasi yang mempunyai konsekuensi atau implikasi terhadap aktifitas politik. Sementara komunikasi politik dalam konteks pilkada merupakan upaya mengetahui seberapa jauh strategi komunikasi politik yang dilakukan suatu partai, tim kampanye dan kandidat untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Deddy Mulyana, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, bahwa komunikasi politik sebagai pertukaran makna yang memengaruhi distribusi dan pengelolaan kekuasaan, maka perebutan makna dukungan politik sudah nampak jelas dan sengit. Hal ini bisa ditangkap dari perang wacana para kandidat (komunikator politik) untuk merebut massa pemilih (komunikan) melalui berbagai pesan politik (message) yang disampaikan dalam beragam media komunikasi politik (channel) agar memenangkan kontestasi politik (effect).

Proses komunikasi politik dalam Pilkada 2020 dimana teknologi yang semakin pesat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis informasi di media sosial, namun masyarakat dituntut untuk dapat membedakan mana informasi yang benar dan yang palsu atau biasa disebut fake/hoaks yang bertebaran dikalangan masyarakat agar tidak salah dalam menerima suatu informasi. Sebagaimana yang dikemukakan Siti Chaerani Dewanti dalam jurnal berjudul Kebijakan Kampanye Secara Daring pada Pilkada Serentak 2020 Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020 menuliskan bahwa strategi kampanye pada masa pandemi saat ini adalah bagaimana peserta pilkada dapat mengatur suatu strategi kampanye yang dapat menarik jumlah khalayak besar sehingga dapat mempengaruhi massa Indonesia dan menjadi saluran untuk pertukaran informasi politik. New media merupakan Faktor terpenting dalam mendukung kinerja komunikasi politik di Pilkada 2020 ini, sehingga tujuan dari e-demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum



milennial dalam pesta demokrasi bisa terwujud. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kries (2013) bahwa komunikasi dasar politik adalah bergantung pada infrastruktur medianya sendiri.

Melalui media sosial twitter, komunikator bisa membangun komunikasi politik dengan para pendukungnya, membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Mayoritas informasi yang terjadi adalah antara politisi atau simpatisannya para buzzer dengan pemilih termasuk pemilih pemula dan kaum milenial. Disini para pemilih atau pembaca tersebut harus mampu memahami opini dan persepsi yang disampaikan oleh para politisi atau buzzer tersebut, apakah itu merupakan ungkapan dari pemikiran pribadinya atau merupakan sikap resmi (institutional rhetoric), seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE melalui akun media sosial twitternya untuk tidak memberikan hak suaranya atau golput pada Pilkada 2020. Harus kita ingat juga bahwa twitter memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi, dan bahkan membentuk hasil dari suatu kampanye (Caplan, 2013, 12).

Pemerintah dan aparat negara sebagai garda terdepan harus mampu melakukan pengawasan dan mengontrol arus informasi yang terjadi pada new media dalam hal ini media sosial twitter. Disamping dari keunggulan pemanfaatan penyampaian informasi menggunakan media sosial seperti twitter selain dapat menembus segala lapisan masyarakat serta kecepatan dalam penyampaian informasi, disaat yang bersamaan juga terdapat ancaman seperti penyebaran hoaks atau informasi-informasi yang di publish rentan untuk dimanipulasi itulah sebabnya perlu pengawasan dan penyaringan dari Pemerintah serta aparat negara. Media politik dalam proses berlangsungnya pilkada 2020 diharapkan dapat menjadi pihak yang independen dan transparan bagi tiap komunikator politiknya, berita-berita terkait berlangsungnya proses pilkada sampai akhir pilkada dipublikasikan berdasarkan fakta dan data, guna menghindari hal yang tidak diinginkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari, begitupun juga dalam proses kampanye, media massa dipergunakan dengan semoral mungkin agar mencerminkan komunikasi politik yang sehat dan bersih.

Pemahaman tentang bahaya Covid-19 di tengah arus Pilkada adalah kewajiban bagi Pemerintah, penyelenggara Pilkada dan masyarakat untuk sama-sama menyadari secara total. Namun tidak hanya sebatas itu, bahwa Pilkada juga menjadi bagian penting untuk mampu menuai hasil maksimal tanpa merugikan orang banyak walaupun terdapat berbagai macam hambatan yang menyertai dan media massa dalam hal ini berperan aktif sebagai media untuk pertukaran informasi, sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan maksimal dengan menerapkan taat protokol kesehatan.

Terkait Pro dan Kontra yang terjadi dilansir dari media Nasional Tempo, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md bahwa kontroversi atau Pro dan Kontra yang muncul setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah hal yang biasa, dan kontroversi yang paling hangat adalah mengenai Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 (<https://nasional.tempo.co/read/1392149/mahfud-md-sebut-lumrah-pro-kontra-penundaan-pilkada-2020>). Oleh karena itu, Pemerintah dan penyelenggara harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tetap mengikuti pesta demokrasi ini dengan mentaati protokol kesehatan ketat dengan memanfaatkan media, karena melalui media sosial komunikasi politik dapat terjadi secara masif.



Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih, dan karuniaNya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan Jurnal ini. Peneliti juga sangat berterimakasih atas dukungan yang luar biasa dari keluarga, khususnya kedua orang tua, serta rekan kerja yang selalu setia memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Jurnal ini. Penulisan jurnal ini, diwujudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Magister Ilmu Komunikasi (S-2) Universitas Budi Luhur. Terima kasih Kepada Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya, bapak Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I, M.Ikom. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abugaza, Anwar. (2013). *Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga*. Tangerang: PT Tali Writing & Publishing House.
- Abidin, Y. Z., Khoerunnisa, R., & Ma'arif, A. A. (2018). Aktivitas Kampanye Public Relations dalam Mensosialisasikan Internet Sehat dan Aman. *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, 79-96
- Aharony, N. "Twitter Use By Three Political Leaders: An Exploratory Analysis". *Emerald Online Information Review* 36 (4) (2012): 587-603
- APJII, (2017). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018 112 |Jurnal Alhadharah; *Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Indonesia*
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsan, T., Prasetyo, W. D., & Pujiyana. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 87-104
- Ihsanuddin, & Fatimah Kartini Bohang. (2017). "Buzzer" Politik Diusulkan Jadi Profesi Terlarang di Indonesia. 22 Februari 2017. <<https://tekno.kompas.com/read/2017/02/22/15170807/.buzzer.politik.diusulkan.jadi.profesi.terlarang.d.i.indonesia>>, diunduh tanggal 4 September 2018
- Juditha, Christiany. (2015). Cyberstalking Di Twitter @Triomacan2000 Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 18 No.1, Juli 2015: 15-28.
- Juditha, Christiany. (2015). Political Marketing Dan Media Sosial (Studi Political Marketing Capres RI 2014 Melalui Facebook). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 19 No. 2 (Juli - Desember 2015) Hal : 225 – 241.
- Lukman, S., Priyatna, C. C., & Sani, A. (2017). *Pelatihan Literasi Komunikasi Politik*
- Yuliahari, D. (2016). Pemanfaatan Twitter Buzzer Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum. *Jurnal The Messenger*, 7(1), 41-48. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v7i1.288>
- Megasari N. Fatanti. (2014). Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal Melalui Internet. *IPTEK-KOM*, Vol. 16 No. 1, Juni 2014: 17-28



Sumber Internet

<https://pers.droneempri.id/pilkada-2020-pro/>(2021, July)

<https://kumparan.com/sabila-nurul-1608551593366524127/peran-komunikasi-politik-dalam-pilkada-2020-di-tengah-situasi-pandemi-1upBQI5104u/full>(2021, July)

KPU Akan Gelar Simulasi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/22572791/kpu-akan-gelarsimulasi-pilkada-di-tengah-pandemicovid-19?page=all>. (2021, July)

Firmansyah, Teguh. (2017). Pengamat: Waspada Buzzer Politik. Diakses dari website: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/07/31/otxq11377-pengamat-waspada-buzzerpolitik> (2021, July)

https://www.kominfo.go.id/content/detail/30882/siaran-pers-no-147hmkominfo112020-tentang-tingkatkan-koordinasi-penanganan-konten-pilkada-2020-agar-ruang-siber-sehat/0/siaran_pers

Pertiwi, W. K. Hampir Setengah Penduduk Bumi Sudah “Melek” Media Sosial. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/07/20/16370017/hampir-setengah-penduduk-bumi-sudah-melek-media-sosial>.(2021, July)

